

ABSTRAK

Zelin Fazriani. NPM. 1305170355. Menguji Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, 2017.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan pemerintah daerah (LKPD).

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintahan dengan arah positif Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan berbasis akrual peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dilakukan kapan saja, selama terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Kelebihan akuntansi berbasis akrual dapat menyajikan laporan akuntansi lebih lengkap dan berfungsi manajerial. Oleh karena itu penelitian telah melakukan wawancara kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tentang bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah robil alamin, penyusun sampaikan kebesaran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Analisa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga* ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada orang tua, teman-teman yang telah membantu penyusun, dan para dosen sekalian.

Akhirnya, penyusun mengharapkan proposal ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia pendidikan dimasa – masa yang akan datang. Tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ayahanda Fajar Sakti dan ibunda tercinta Tatiani selaku orang tua yang selama ini melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan yang tidak bisa dapat dihitng besarnya serta doa restunya

sehingga penulis berhasil menyelesaikan seluruh kegiatan dan penulisan skripsi ini

2. Bapak Dr. Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Maya Sari SE, M.Si, AK, AC. selaku dosen pembimbing skripsi saya telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran selama penulis masih dalam perkuliahan
8. Pimpinan serta para staff dan pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Sibolga. Yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh data – data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat saya, Retno Amalia Pratiwi, Winda Yuliani Simanjuntak, Silvia, Nopa Fidela, Dwi Irna Hasana Tanjung, Dede May Putri Maharani, Devi Pohan, Yunda Nila Sari, Aidil Akbar Hasibuan, Dicky,

Ridhawarni Tanjung, Terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh mahasiswa Akuntansi F pagi stambuk 2013 yang tidak bisa disebut satu persatu dimana telah memberikan semangat dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah – mudahan Allah SWT memberikan balasan dengan curahan rahmad yang tidak terhingga terhadap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga hasil penulisan dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin

Waasalamu Alaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2017

Penulis

ZELIN FAZRIANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Akuntansi	7
a. Akuntansi Bagian Ilmu Sosial	7
b. Definisi Akuntansi	8
c. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	9
d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	10
e. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	18
f. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah	19
2. Laporan Keuangan (<i>Financial Statement</i>)	21
a. Kualitas Laporan Keuangan	21
b. Laporan Keuangan Pemerintah	22
B. Penelitian Terdahulu	26

C. Kerangka Berpikir	28
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Teknik Penumpukan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil penelitian.....	35
1. Deskripsi Data	35
2. Penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis AkruaI	35
3. Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis AkruaI	38
4. Kondisi Umum Keuangan Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan Laporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis AkruaI	40
5. Profitabilitas Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan Laporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis AkruaI	41
B. Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel III. 1	Jadwal Penelitian Tahun 2017	32
Tabel IV.1	perubahan Dinas menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga	35
Tabel IV.2	Gambaran Likuiditas, kondisi umum keuangan dan profitabilitas Berkas akrual pemerintah kota sibolga	37
Tabel IV.3	Laporan kas pemerintah kota sibolga	38
Tabel IV.4	Aset lancar dan utang lancar pemerintahan kota sibolga.....	39
Tabel IV. 5	Kondisi umum keuangan pemerintah kota sibolga.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Penerapan SAPD Pada Siklus Akuntansi	19
Gambar II.2	Komponen Laporan Keuangan	23
Gambar II.3	Kerangka Berpikir Penelitian	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), menjadi salah satu langkah nyata yang diinginkan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga pada pemerintahan daerah. Perwujudan pemerintahan yang diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif, serta akuntabel sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dinilai sebagai pemerintahan yang memiliki kredibilitas.

Perwujudan *good governance* dilakukan melalui pilihan paradigma pemerintahan baru yang dikelola melalui upaya-upaya pembagian kekuasaan, hingga daerah mampu mandiri, berkompetisi secara regional, nasional, juga pada tingkat internasional. Menghindari sistem ketergantungan daerah kepada pusat dalam kebijakan-kebijakan yang menunjukkan ketidak mandirian dan rentan terhadap praktik-praktik keuangan yang habis dikelola bersama dengan mengabaikan kepentingan rakyat.

Wujud *good governance* salah satunya melalui perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Berkenaan dengan proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak, terutama dalam rangka keuangan negara mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Proses yang panjang, reformasi sistem keuangan nasional dalam laporan keuangan pemerintahan melahirkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).

Penerapan PP SAP untuk pertama kali di Indonesia menjadi standar akuntansi pemerintahan. Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan Standar Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal Pinang. Dalam sambutannya Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan daerah.

SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003, menyatakan bahwa “pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. Namun hingga tahun 2008 hal ini belum terlaksana. Hingga mencapai kesepakatan Pemerintah dan DPR bahwa pelaksanaannya akan dilakukan awal tahun 2015.

Satu tahun pelaksanaannya hingga tahun 2016 dan awal tahun 2017 ini pelaksanaan SAP masih terasa berat bagi daerah-daerah karena pelaksanaan di daerah masih minim sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan standar akuntansi yang diinginkan serta minimnya pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ketiadaan sanksi, dari apa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) jika tidak melaksanakan SAP? Sampai saat ini belum ada. BPK selaku auditor justru tak jarang diminta oleh Pemda menjadi konsultan atau membantu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuatu yang tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana kalau opini BPK atas LKPD berupa “tidak wajar” atau

“*disclaimer*”? Apakah kepala daerah yang selama 5 tahun masa jabatannya mendapat opini *disclaimer* boleh mencalonkan diri lagi? Selain itu ditambah *image* bahwa akuntansi akan menutup ruang untuk memanfaatkan uang negara, maka Pemda mencari pembenaran untuk menunda-nunda penerapan SAP. Pemda mencari justifikasi atau *excuse* untuk sekedar melaksanakan penatausahaan, misalnya dengan berpura-pura tidak tahu, berperilaku masa bodoh, dan menunjukkan *power* keotonomiannya.

Penerapan akuntansi berbasis akrual, dengan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Berbeda dengan basis kas pada keuangan daerah sebelumnya sebagai peristiwa akuntansi diakui dan dicatat apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas dan dibatasi oleh waktu kas diterima atau dibayarkan. Hingga sangat memungkinkan, terjadinya kehilangan uang dari transaksi penerimaan dan pembayaran di akhir tahun atau karena berakhirnya satu periode pemerintahan daerah selama kurang lebih lima tahun. Pada SAP berbasis akrual peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dilakukan kapan saja, selama terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Kelebihan akuntansi berbasis akrual dapat menyajikan laporan akuntansi lebih lengkap dan memenuhi fungsi manajerial pengawasan.

Sistem Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD menjadi sumber laporan keuangan (SKPKD), oleh karena itu laporan keuangan SKPD harus dilakukan sebaik mungkin, berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Transaksi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD Pemerintah Kota Sibolga merupakan bagian dari penyelenggara SAP, yang secara teknis menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Realisasi akuntansi berbasis akrual sebagai SAP menghasilkan: 1) laporan realisasi anggaran (LRA), 2) laporan perubahan saldo anggaran (SAL), 3) laporan operasional (LO), 4) neraca, laporan arus kas (LAK), 5) laporan perubahan ekuitas (LPE), 6) catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Faktor kesiapan pemerintah daerah Kota Sibolga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan SAP dalam rangka mencapai laporan keuangan daerah yang berkualitas. Berdasarkan keadaan di atas, maka akan diteliti tentang: **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Masih lemahnya sumber daya manusia di Pemerintah Kota Sibolga dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual.
2. Pencarian pembenaran dalam pelaksanaan SAP guna mewujudkan kualitas laporan keuangan dengan cara kurang optimal memahami dan melaksanakan standar akuntansi yang sudah ditetapkan sejak tahun 2015 secara nasional.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menurut Wirartha (2010: 9) adalah pernyataan masalah, menunjukkan gambaran yang akan dicapai dan arah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini: Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menerangkan suatu fenomena yang dihubungkan dengan fenomena lainnya untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai, secara akademis, teoritis dan praktis adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi khususnya berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis laporan keuangan akrual sejak penerapannya tahun 2015 secara nasional.

2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini menjadi masukan yang memberikan informasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis laporan keuangan akrual.
3. Bagi penelitian selanjutnya hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan khususnya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis laporan keuangan akrual pada pemerintah daerah tidak hanya pada dinas pemerintah, tetapi juga pada tingkat di atas atau bahkan pada tingkat desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Akuntansi

a. Akuntansi Bagian Ilmu Sosial

Akuntansi hingga saat ini diklasifikasikan sebagai “bagian dari ilmu sosial (Yadiati, 2015: 1).” Ilmu sosial merupakan ilmu terapan yang menunjukkan akuntansi menjadi ekspresi mengenai cara kerja pikiran sehingga menghasilkan pengetahuan yang memiliki karakteristik ‘rasional dan dapat diandalkan’. Pendekatan baku yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah didasarkan pada penggunaan penalaran deduktif (umum) dan penalaran induktif (khusus).

Karakteristik pengetahuan rasional dan dapat diandalkan dalam praktik sosial di rumah tangga, bahkan pada organisasi pekerjaan bagi para akuntan dapat dilihat pada lima klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan praktis, yakni pengetahuan yang dapat dipraktikkan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pengetahuan intelektual, berupa pengetahuan yang dapat memenuhi rasa penasaran.
- 3) Pengetahuan ringan, berupa upaya pemenuhan emosional dan sejenak.
- 4) Pengetahuan spiritual, pengetahuan yang dihubungkan dengan pengetahuan Agama tentang Tuhan dan cara-cara keselamatan jiwa.
- 5) Pengetahuan yang tidak diinginkan, pengetahuan yang tidak diminati tetapi pengetahuan itu tiba-tiba diketahui tanpa disengaja.

b. Definisi Akuntansi

Berikut beberapa definisi akuntansi untuk melihat ruang lingkupnya dalam ilmu pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Yadiati (2015: 1), yakni:

- Definisi menurut *Accounting Principle Board (APB)* dalam *Statement No. 4* disebutkan: Akuntansi adalah sebuah ‘kegiatan jasa’ (*service activity*) fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis diantara tindakan-tindakan alternatif.
- *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam *Accounting Terminology Bulletin No. 1*, tahun 1953 dinyatakan: Akuntansi adalah ‘seni’ pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.

Berdasarkan pada dua pendapat di atas, maka akuntansi sebagai alat (*tools*) yang menyediakan informasi. Sebagai seni, akuntansi dimaksudkan untuk melakukan pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran, sampai pada seni menafsirkan hasil dari transaksi keuangan. Sebagai ilmu pengetahuan sosial akuntansi menjadi seperangkat metode dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan pemikiran ilmiah. Hingga akuntansi tidak semata-mata menjadi pengetahuan teknik dan mekanik yang isinya hanya tentang bagaimana cara mencatat dan menyusun laporan keuangan semata. Pada pendekatan pemerintahan yang baik (*good governance*) bagaimana laporan keuangan menjadi alat dan seni mensejahterakan masyarakat.

Beberapa pakar mendefinisikan akuntansi (*accounting*) sebagai ‘proses pengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan’ (Manurung, 2011: 1). Artinya, akuntansi atau pekerjaan akuntansi merupakan proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (transaksi) dan melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut dengan laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada para pelanggan.

c. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 239 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah harus ‘menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada SAP (Dailibas, Nasution, dan Suwanda, 2015: 7).” Kebijakan akuntansi ini merupakan dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaporan keuangan.

Peraturan kepala daerah tentang kebijaksanaan akuntansi tersebut seminimal mungkin memuat tentang:

- 1) Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan.
- 2) Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Pengakuan dan pengukuran pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan daerah mencakup harga standar yang ditetapkan sebagai harga perolehan dan kapitalisasi aset. Harga perolehan menjadi pengakuan terhadap jumlah kas atau

setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian, atau belanja pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan tetap. Kebijakan kapitalisasi aset pengakuan terhadap jumlah kas atau setara kas dan nilai wajar imbalannya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran akan dimuat dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat dan daerah.

SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu:

- a. SAP berbasis akrual yakni pengakuan terhadap beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi

dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

- b. SAP berbasis Kas menuju Akruwal, dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. PSAP ini dapat digunakan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.

SAP menjadi prinsip-prinsip akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Pendekatan akrual yang digunakan sebagai pendapatan ‘diakui pada saat terjadi transaksi’ (Hanafi, dan Halim, 2016: 16). Atau lebih tepatnya, pendapatan diakui ketika sebagian besar atau semua dari jasa yang dilakukan sudah dilakukan serta kas atau piutang sebagian besar dan kepastiannya relatif bisa ditentukan telah diterima. Pada kebanyakan perusahaan, pendapatan diakui pada waktu barang dan jasa telah selesai dilakukan. Atau dengan kata lain, pendekatan akrual pada dasarnya “memfokuskan pada perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis dalam operasi, tidak harus pada aliran kas.” Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menekankan pada pendekatan akrual, di mana laporan keuangan dilakukan dan perhitungan keuntungan usaha dan penggunaan sumber daya ekonomis pada saat

terjadinya transaksi, tidak harus pada aliran kas pemerintah yang bisa saja dilakukan secara kredit.

Proses pencatatan dalam transaksi kas akan memunculkan permasalahan bagi keuangan pemerintah ketika proses operasi tidak terjadi dalam jangka waktu satu tahun atau satu periode akuntansi pemerintahan. Misalkan, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Sibolga membangun kantor Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga sebesar Rp. 1 miliar, dan belum digunakan hingga tahun 2017, maka pemerintah daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 1 miliar pada tahun pertama. Sesudah digunakan untuk keperluan operasional kantor, barulah terhitung bisa menghasilkan penjualan 100 juta pertahunnya sebagai aset dan piutang. Dilihat dari prinsip *matching*, pertemuan antara pendapatan dengan biaya, pendekatan kas tidak baik, karena pendapatan pada tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan dengan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Ketidakseimbangan juga terjadi pada tahun pertama pemerintah daerah rugi besar, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya mengalami untung besar. Catatan rugi dan keuntungan itu menjadi bagian terpisah, tidak menggambarkan pengembalian modal awal yang sudah digunakan dari kas pemerintah daerah, selama lebih dari satu tahun laporan keuangan.

Pendekatan akrual pada SAP saat ini menginginkan prinsip *matching*, yakni berupa pencatatan pendapatan dengan biaya. Fokusnya pada perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis dalam operasi, hingga memunculkan produktivitas keuangan pemerintah daerah.

Produktivitas sebagai tingkat perbandingan antara hasil keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) (Triton PB, 2005: 61). Produktivitas menginginkan hasil

keluaran atau modal yang digunakan setidaknya imbang dengan pendapatan yang akan diperoleh melalui bisnis yang dilakukan. Hingga tidak membebani keuangan dalam laporan keuangan setiap tahun. Dewan Produktivitas Nasional memberikan pengertian produktivitas sebagai sikap mental yang selalu berpandangan “bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.”

Produktivitas juga bisa dipandang sebagai fungsi dari efektivitas dan efisiensi, hingga dirumuskan sebagai berikut:

$$P = f(e.i) \text{ (Atmosoepipto, 2001: 4)}$$

Penjelasan rumus:

P = Produktivitas

f = Fungsi

e = Efektivitas pencapaian sasaran

i = Efisiensi penggunaan masukan

Efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan keuangan daerah akan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi daerah (produktif). Efisiensi dan efektivitas rendah, menunjukkan terjadinya salah urus (*mis management*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas tinggi tetapi efisiensi rendah, menyatakan terjadinya pemborosan (*high cost*). Efisiensi tinggi tetapi efektivitas rendah, berarti tidak mencapai sasaran, atau menyimpang dari target.

Perbaikan produktivitas keuangan pemerintah daerah seharusnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui pelayanan yang lebih responsif, meningkatkan *cash flow*, memperluas pengembangan aset, dan memperbesar keuntungan. Bahkan, perbaikan produktivitas kerja pemerintah

daerah melalui penerapan SAP guna mencapai kualitas laporan keuangan yang mampu mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek (*likuiditas*), keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang (kondisi umum keuangan), dan kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang (*profitabilitas*). Hingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesionalitas pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh dapat digambarkan dengan adanya proses bisnis, dan siklus yang saling terhubung, terkait satu dengan lainnya. Bahwa, bisnis pemerintah melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan serta audit menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat prosedur pemerintahan dan kewenangan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah untuk melaksanakan bisnis atau membatalkannya. Komunikasi data menjadi bagian penting untuk menjamin kesatuan prosedur dan kewenangan pemerintah dalam bisnis yang dijalankan hingga tidak menjadi beban keuangan daerah. Kemajuan teknologi informasi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memastikan konsistensi bisnis pemerintah dalam memberikan laba pada keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara dengan SAP yang sudah ditetapkan bagi pemerintah daerah memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar (*Chart of Accounts*). Bagan Akun Standar (BAS) mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi. Kode perkiraan tersebut terdiri dari sekumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan

akun yang digunakan sebagai jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

Berdasarkan tujuan-tujuan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh laba dalam manajemen kinerja, maka BAS disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Untuk itu menurut Dailibas, Nasution, dan Suwanda (2015: 35), perlu dipertimbangkan hal-hal berikut dalam penyusunan keuangan daerah berbasis SAP dengan cara:

- 1) Memungkinkan adanya analisis “*multi dimensional level*)” dalam penyusunan BAS.
- 2) Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat.
- 3) Menyederhanakan proses manual sehingga dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan *review* analitis.
- 4) Pengembangan dan perbaikan proses bisnis.
- 5) Kombinasi antara orang, proses, dan teknologi.

Tujuan pembuatan BAS pada keuangan pemerintahan daerah sebagai pembakuan kode perkiraan akuntansi melalui proses akomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa, hingga diperoleh:

- 1) Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional.
- 2) Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel.
- 3) Laporan keuangan mengakomodir dengan baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan.

Agar program perencanaan dan pengendalian laba pada bisnis pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik, harus mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan seperti yang dikemukakan oleh Julita (2008: hal 3-4), yakni:

- 1) Program anggaran harus didukung oleh semua tingkat manajemen puncak, 2) Program anggaran daerah terstruktur dalam bagan organisasi, 3) Program penganggaran didukung oleh sistem informasi, 4) Adanya sikap untuk melakukan riset dan analisis anggaran, 5) Adanya partisipasi aktif para staf dan pejabat daerah, 6) Adanya pengertian yang jelas atas asumsi-asumsi, 7) Adanya skedul rinci atas pendapatan (*revenue*) dan biaya (*cost*) per periode, 8) Adanya standar baku keuangan, dan 9) Adanya tindakan cepat bila terjadi penyimpangan dari apa yang dianggarkan.

Prinsip-prinsip dasar perencanaan dan pengendalian laba ini bisa diterjemahkan menjadi program anggaran daerah. Bahwa program anggaran daerah harus didukung oleh semua tingkat manajemen puncak. Tidak dapat disangkal bahwa pembinaan program penganggaran sering mendapat tantangan yang aktif ataupun pasif terutama oleh manajemen tingkat menengah, karena rasa keengganan mereka untuk diawasi melalui sistem penganggaran mengenai prestasi kerja. Sehingga pada mereka perlu diyakinkan bahwa program anggaran adalah untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah daerah secara keseluruhan, terutama keyakinan dari manajemen puncak yang menjadi pengawas tertinggi mengenai pelaksanaan anggaran dan manfaat yang dicapai. Hanya dengan dukungan sepenuhnya dari manajemen puncak, program penganggaran akan dilaksanakan oleh para bawahan.

Program penganggaran harus didasarkan pada struktur organisasi yang baik. Tujuan organisasi pada tingkat pemerintahan daerah untuk membina suatu kerangka yaitu semua kegiatan dapat dilakukan dikoordinasikan dalam rangka

mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan jelas dan batasan-batasannya.

Program penganggaran didukung oleh sistem informasi yang baik. Setiap pelaksanaan program penganggaran harus dengan segera harus dilakukan dan dilakukan oleh manajer yang bersangkutan, dan diperhatikan agar laporan yang disampaikan masih sesuai bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Adanya sikap untuk melakukan riset dan analisis secara terus menerus agar dapat ditemukan metode-metode yang lebih baik dalam menyusun anggaran pemerintahan daerah. Melalui perbaikan-perbaikan penganggaran keuangan daerah dan dapat dievaluasi kembali sebagai perbaikan perencanaan pada periode akan datang.

Adanya partisipasi aktif dari para manajer fungsional atau pejabat daerah dalam rangka adaptasi sistem keuangan daerah. Partisipasi aktif menunjukkan kemampuan dan kemauan para pejabat fungsional dan pejabat struktural dalam mengendalikan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Adanya pengertian yang jelas atas asumsi-asumsi yang dibuat. Asumsi-asumsi keuangan daerah yang menjadi dasar perencanaan, dan pengendalian keuangan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Laporan keuangan daerah juga menginginkan adanya skedul rinci atas pendapatan (*revenue*) dan biaya (*cost*) per periode. Hingga bisa diketahui secara rinci dan pasti keunggulan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adanya standar baku, berupa bagan akun standar (BAS). Hingga standar ini memungkinkan adanya analisis multi dimensi pada setiap level (*multi dimensionoal level*) dalam penyusunan keuangan pemerintah daerah.

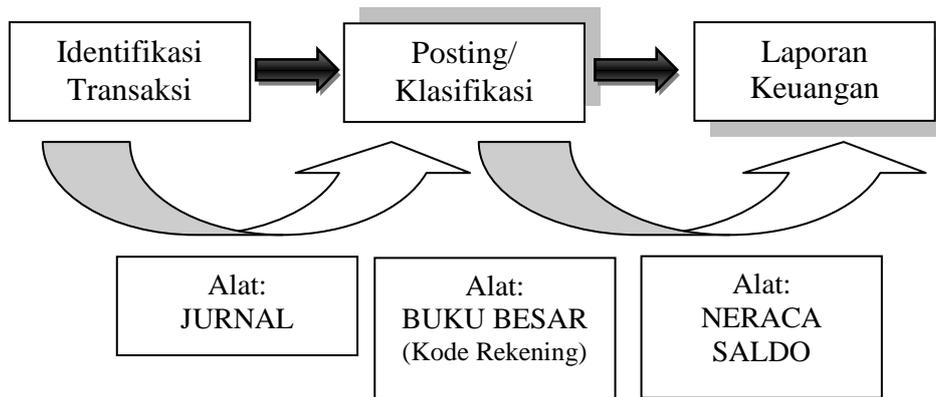
Adanya tindakan yang cepat bila terdapat penyimpangan dan apa yang dianggarkan dalam keuangan daerah. Sebagai tindakan koreksi terhadap pengembangan atau perbaikan proses bisnis yang dilakukan pemerintah daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketepatan staf keuangan, proses keuangan, dan teknologi keuangan daerah. Hingga tidak menjadikan kecurangan dibiarkan dalam rangka menyelamatkan keuangan daerah dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

e. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan instrumen untuk mengoperasikan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan ‘rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan laporan keuangan’ (Dailibas, Nasution, Suwanda, 2015: 15).

SAPD menjadi pedoman guna menjelaskan siapa melakukan apa, dan penegasan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Prinsip SPAD menyusun para petugas yakni aparatur pemerintah daerah yang menjalankan akuntansi memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Penerapan SAPD pada siklus akuntansi digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.01
Penerapan SAPD Pada Siklus Akuntansi

Alat untuk menggambarkan siklus akuntansi adalah menggunakan alat jurnal untuk transaksi, kode rekening (buku besar untuk proses) serta neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Identifikasi transaksi menggunakan jurnal, sebagai catatan kejadian transaksi keuangan pemerintah daerah, kemudian di posting berdasarkan kode rekening melalui buku besar, dan menjadi laporan keuangan sebagai neraca saldo keuangan pemerintah daerah.

f. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

Siklus akuntansi pemerintah daerah dapat dilihat sebagai tahapan-tahapan atau langkah-langkah sistematis yang harus dilalui dalam laporan keuangan sebagai produk akuntansi, yakni:

- 1) Pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal.
- 2) Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual maka digunakan daftar akun sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun

Standar (BAS), dengan menuliskan kode nama akun detail sampai level 5 yakni rincian objek. Penjurnalan dibedakan menjadi 2:

- (1) Jurnal finansial, dengan kode awal 1-aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas, serta 8-pendapatan sebagai laporan operasional (LO), dan 9-beban.
- (2) Jurnal anggaran, dengan kode awal 4-pendapatan sebagai laporan realisasi anggaran (LRA), 5-belanja, 6-transfer, dan 7-pembiayaan dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas.
- 3) Pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal, pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja, yakni melibatkan akun dengan kode awal 1-aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas, serta 8-pendapatan sebagai laporan operasional (LO), dan 9-beban.
- 4) Posting ke buku besar.
- 5) Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian.
- 6) Penyusunan laporan keuangan terdiri dari:
 - Laporan realisasi anggaran (LRA).
 - Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL).
 - Laporan operasional (LO).
 - Laporan perubahan ekuitas (LPE).
 - Neraca.
 - Laporan arus kas (LAK)
- 7) Pencatatan jurnal penutup di buku jurnal.
- 8) Penyusunan neraca saldo setelah penutupan.

2. Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

a. Kualitas Laporan Keuangan

Kata kualitas menunjuk pada gambaran karakteristik langsung dari suatu produk seperti: kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), kemudahan dalam penggunaan (*ease of use*), dan estetika (*esthetics*) (Gaspersz, 2011: hal 6). Kualitas secara strategik dalam kompetisi global menunjukkan perhatian serius kepada pelanggan dengan segala kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). Keistimewaan atau keunggulan produk, termasuk jasa pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dengan mengukur secara nyata kinerja, keandalan, kemudahan, dan moral dari penyelenggara layanan publik dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini sedang menjadi sorotan tajam karena kualitas yang rendah.

Pada kenyataan yang dilihat dan dirasakan sehari-hari dalam pelayanan publik, kualitas menunjukkan keistimewaan produk, berupa pelayanan yang diberikan dan dilakukan terus menerus dalam rangka mencapai kepuasan publik. Pada waktu yang akan datang, kualitas menjadi nilai, sebagai suatu pelayanan yang bebas dari kekurangan, tujuannya mencapai kepuasan pelanggan, yakni masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pemerintah.

Kepuasan masyarakat menunjukkan perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk aktual dengan produk yang diharapkan (Sangadji, dan Sopiah, 2013: hal 180). Menurut Kotler (2005), kepuasan adalah sejauh mana suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen

menjadi nilai harapan yang terpenuhi dari pelayanan-pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Ketika kata kualitas dijadikan keinginan publik dalam laporan keuangan (*financial statement*) pada pemerintah daerah menunjukkan keinginan kuat dalam guna menunjukkan kinerja, keandalan, kemudahan, dan moral dari penyelenggara layanan publik melalui pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan merupakan produk dari proses akuntansi (Manurung, 2011: hal 1). Laporan keuangan yang biasa dipublikasikan adalah: 1) neraca (*balance sheet*), 2) laporan laba rugi (*income statement*), 3) laporan arus kas (*cash flow statement*), 4) tambahan laporan lain seperti laporan perubahan modal, laporan laba ditahan.

Secara terbuka, pemenuhan terhadap prinsip akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah daerah pada setiap periode anggaran dipublikasikan dan mendapat penilaian dari publik terhadap kinerja, keandalan, kemudahan, dan moral dari penyelenggara layanan publik. Hingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan merugi karena pengabaian terhadap prinsip produktivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Tidak menekankan pada prinsip efisiensi, menghambat pembangunan daerah, atau efektivitas tetapi menyebabkan pemborosan.

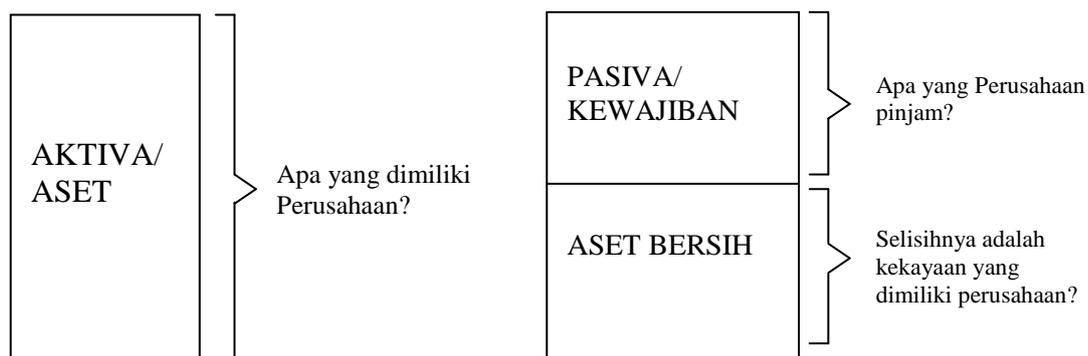
b. Laporan Keuangan Pemerintah

Akuntansi atau pekerjaan akuntansi pemerintah di sini dalam laporan keuangan yang dipublikasikan sebenarnya menjadi nilai bagi publik, masyarakat luas di daerah tentang laporan keuangan untuk mengetahui kinerja pemerintahan yang selama ini berkonotasi memiliki rapot merah dalam hal keuangan.

Pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan tidak terjadi karena tidak menunjukkan produktivitas sebagai sikap mental yang menginginkan capaian laporan keuangan yang berbasis kinerja, andal, mudah, dan berdasarkan pada moral dari penyelenggara layanan publik.

Laporan keuangan digunakan untuk menelusuri nilai uang dari barang dan jasa yang masuk ke dalam dan ke luar perusahaan. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan pemerintah daerah menjadikan nilai keuntungan sebagai laporan kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah memberikan sarana untuk menentukan apakah keuangan digunakan secara efektif dan efisien sebagai gambaran produktivitas kerja keuangan dan tidak melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Laporan keuangan menurut Stoner, et.al, (2003: hal 255), menggambarkan tentang: (1) *Likuiditas*: kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek; (2) *Kondisi umum keuangan*: keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang); dan (3) *Profitabilitas*: kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

Komponen laporan keuangan perusahaan yang tidak jauh berbeda dari komponen keuangan pemerintah daerah digambarkan sebagai perbandingan antara aktiva dikurangi pasiva, menjadi aset bersih usaha yang dijalankan baik oleh pemerintah dan pihak swasta. Akan digambarkan sebagai berikut di bawah ini:



Gambar II.02
Komponen Laporan Keuangan

Sumber: Margaretha, 2011: 9

Kalau bagan ini diterjemahkan dalam komponen laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan posisi aktiva sebagai aset pemerintah. Aktiva pemerintah di kurangi dengan pasiva, sebagai kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran menjadi aset bersih yang dimiliki pada satu periode keuangan.

Tujuan pelaporan keuangan secara umum sebagai: 1) Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, 2) Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakai eksternal, dan 3) Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan (Hanafi, dan Halim, 2016: hal 30).

Laporan keuangan dimanfaatkan oleh para investor, kreditor, dan para pemakai lainnya saat ini atau pada masa datang (potensial), sebagai dasar melakukan keputusan investasi, dan kredit. Hingga memberikan kesempatan kepada para investor menjadi mitra perusahaan atau dalam penelitian ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan pembangunan di daerah, yang saling memberikan keuntungan dalam rangka bisnis.

Laporan keuangan juga memberikan manfaat bagi para pemakai eksternal untuk memperkirakan waktu dan ketidakpastian (yang berarti risiko) penerimaan kas yang bersangkutan ketika memutuskan untuk investasi atau dalam rangka memberikan kredit kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Hingga para kreditur sebagai pemakai laporan keuangan eksternal harus mendapat aliran kas masuk bukan hanya untuk mengembalikan *return* yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya. Laporan keuangan akan memberikan bantuan kepada para investor dan kreditur menganalisis jumlah dan waktu penerimaan kas yakni berupa deviden (bunga) dan juga memperkirakan risiko yang berkaitan dengan keputusan.

Penerimaan kas pihak eksternal akan ditentukan oleh aliran kas masuk perusahaan. Perusahaan yang kesulitan kas akan mengalami kesulitan untuk memberi kas ke pihak eksternal, dan dengan demikian penerimaan pihak eksternal akan terpengaruh.

Hubungan antara SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah memberikan pilihan-pilihan akuntansi dengan laporan keuangan sebagai produk akuntansi dan para akuntan untuk diterapkan dalam proses akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerapkan pilihan sesuai dengan asas prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur di dalam SAP sesuai kepentingannya ke dalam kebijakan akuntansi untuk sajian keuangan dalam laporan keuangan secara wajar kepada para pengguna. Proses pengumpulan data transaksi sampai dengan disajikan dalam laporan keuangan melalui suatu proses yang terstruktur diatur dalam suatu sistem akuntansi pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk pilihan bagan atau standar yang digunakan. Terdapat 9 kode akun yang

menggambarkan karakteristik masing-masing akun yang dapat digunakan sebagai Bagan Akun Standar (BAS) (Dailibas, Nasution, Suwanda, 2015: 11), sebagai berikut:

- 1) Akun 1 (satu) menunjukkan aset.
- 2) Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban.
- 3) Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas.
- 4) Akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan – LRA.
- 5) Akun 5 (lima) menunjukkan belanja.
- 6) Akun 6 (enam) menunjukkan transfer.
- 7) Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan.
- 8) Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan – LO.
- 9) Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tidak hanya berpedoman pada data yang didapat dari Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, juga menggunakan referensi penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil	Sumber
1	Monika Khairunnisa Suwati	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus pada Dinas	Dependent	Disimpulkan: Adanya hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 1 tentang	Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Vol. 1 No. 2

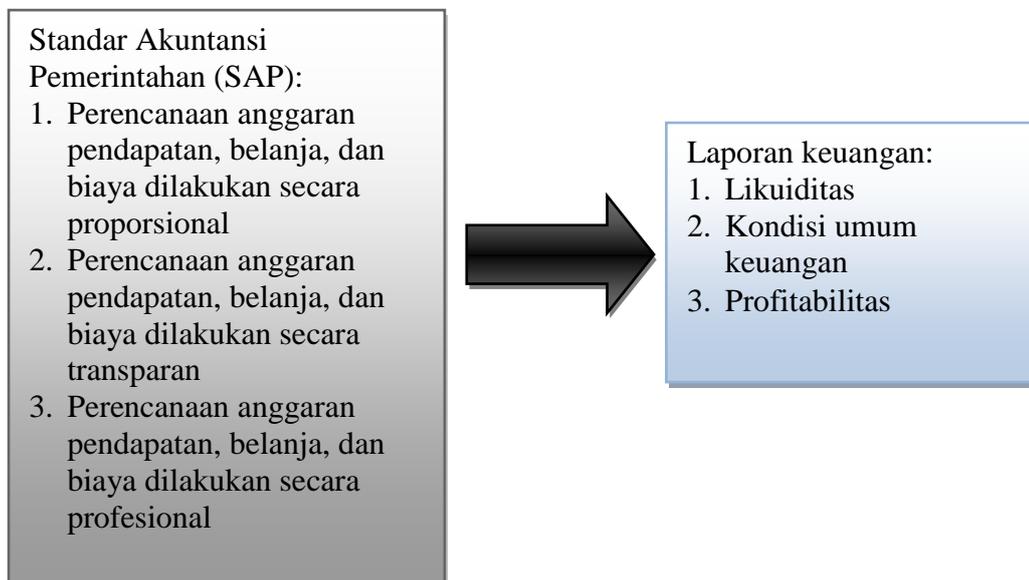
		Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)		penyajian laporan keuangan) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.	
2	Olga Yani Fransiska Singkali. Retnaningtyas Widuri	Penerapan SAP pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara	Independent	Disimpulkan: Evaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiataan pada DPPKAD Kabupaten Toraja sudah sesuai SAP	Tax & Accounting Review, Vol. 2 No. 4, 2014.
3	Silvi Wahyuni, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makasar	Analisis Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	Independent	Disimpulkan: Audit Internal Inspektoral Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting dalam menemukan dan mencegah kecurangan dimulai dari pemberian pendampingan, serta pengawasan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah secara reguler	UNHAS, Makasar, 2013.
4	Risdawati. Mulyani.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Yang Memperoleh Opini Wajar	Independent	Disimpulkan: Kelemahan Standar Pemeriksaan Internal (SPI) dengan ketidakpatuhan terhadap	Jurnal Universitas Tarumanagara, 2013.

		Dengan Pengecualian (Menggunakan <i>Content Analysis</i>)		peraturan perundang-undangan berakibat pada lemahnya komitmen pada kompetensi, kepemimpinan kurang kondusif, tidak adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	
5	Moh. Mahudi Arif	Analisis Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Atandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)	Independent	Disimpulkan: Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005, menggunakan basis kas menuju akrual. Kendala dalam persiapan SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD	Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3 No.1

C. Kerangka Berpikir

Berikut akan digambarkan kerangka berpikir penelitian guna menganalisis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan

Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, sebagai berikut di bawah ini:



Gambar II.03
Kerangka Berpikir Penelitian

SAP sebagai standar akuntansi pemerintahan yang menunjukkan perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilakukan secara proporsional yakni sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing aparatur sipil negara yang ada sehingga menjadi kesatuan antara orang, prosedur dan teknologi. Prinsip transparan menunjuk pada keterbukaan laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat luas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Serta profesional menjadi acuan pemahaman oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rencana anggaran pendapatan, belanja, dan biaya operasional pemerintah daerah dengan berdasarkan pada prinsip produktivitas kerja dengan dukungan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan pemerintah daerah.

Maksimalisasi SAP menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam keadaan:

1. *Likuiditas*: kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek.
2. *Kondisi umum keuangan*: keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang).
3. *Profitabilitas*: kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini dengan menggunakan jenis deskriptif. Menggambarkan apa adanya temuan penelitian tanpa melakukan rekayasa data. Bogdan dan Taylor dalam Iskandar (2009: hal 11), data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati menggunakan metodologi kualitatif.

Riset deskriptif ini menurut Kriyantono (2007: hal 69) bertujuan untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan jenis deskriptif pada penelitian ini menggambarkan apa sebagai gambaran pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

B. Definisi Operasional

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat atau daerah. Menurut PP No. 71 (2010:1) kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi acuan bagi:

- 1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- 3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
- 4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kerangka berpikir berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Terjadinya pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.

Laporan keuangan sebagai hasil akuntansi pemerintahan berdasarkan SAP. Diterjemahkan menjadi laporan keuangan yang *likuiditas*: kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek, gambaran *kondisi umum keuangan*: keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang),

dan *profitabilitas*: kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga, dari bulan Februari 2017 sampai dengan selesai.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian Tahun 2017

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal																
Penyusunan proposal																
Seminar Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Pengumpulan dan Analisis Data																

Sumber: Jadwal Penelitian Tahun 2017

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Observasi, upaya yang penulis lakukan untuk memperoleh data dengan langkah-langkah sistematis dan terukur. Saya melakukan pengamatan dengan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Pada tahap awal observasi pada kajian terdahulu dari berbagai jurnal tentang penerapan SAP diberbagai daerah se Indonesia menjadi masukan dalam meningkatkan laporan keuangan daerah.

2. Instrumen pedoman wawancara, saya maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian tentang penerapan SAP pada laporan keuangan pemerintah daerah. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik wawancara untuk memperoleh informasi tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan informan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian penulis lakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yang menurut pendapat Arikunto (2010: 269), adalah: analisis deskriptif kualitatif tentu harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas. Metode dengan menggunakan pengumpulan data, mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan data dan informasi tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta yang diteliti.

Tahapan-tahapan teknik analisis data penelitian yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data.
- 2) Mengidentifikasi laporan keuangan.
- 3) Menilai kualitas laporan keuangan.
- 4) Membuat kesimpulan atas data, laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan untuk menjawab penerapan SAP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Sesuai dengan analisis yang penulis gunakan, maka data yang di perlukan berupa dokumen-dokumen yang sudah tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, dengan wawancara secara langsung dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Kemudian data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tersebut dianalisis dengan melihat laporan keuangan yang memenuhi syarat pemerintahan dengan berbasis akrual sudah sesuai dengan unsur-unsur berbasis akurual yang di terapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan melakukan analisis tersebut maka penulis akan mengetahui apakah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga sudah melakukan menerapkan sistem standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

2. Penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akrual

Penyelenggaraan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berdasarkan *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) dalam upaya memenuhi kualitas laporan keuangan

yang dimengerti dan dipahami (*understandability*) oleh semua pihak. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai berbeda-beda, seperti pihak eksekutif, legislatif, akademisi, kreditur, investor, auditor, pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, LSM, ahli statistik, ahli ekonomi, perbankan, dan karyawan. Atau secara sederhana dapat dikatakan keinginan pemakai laporan keuangan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi, atau dari sisi masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang diberikan kepada pemerintah, baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah sebagai biaya pembangunan dan biaya operasional pelayanan publik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugas dan fungsi masing-masing, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Laporan keuangan dijadikan dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dasar akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai dasar pengambil keputusan, dalam penelitian ini menggambarkan tentang laporan keuangan yang *likuiditas*, mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek, *kondisi umum keuangan* berupa keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang), serta *profitabilitas*, sebagai kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

Berikut ini laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tahun 2014 dan 2015:

Tabel IV.1
Gambaran Likuiditas, Kondisi Umum Keuangan
Dan Profitabilitas Berbasis Akrua
Pemerintah Kota Sibolga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2015
1	Ekuitas Awal	1.542.398.750.591,00
2	Surplus/Defisit – LO	72.788.762.763,07
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
4	Koreksi Nilai Persediaan	(26.130.241,40)
5	Selisih Evaluasi Aset Tetap	-
6	Lain-lain	-
7	Ekuitas Akhir	1.542.372.620.349,60

Sumber: Laporan Operasional Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015 dan 2010.

The accrual base dalam pengakuan pendapatan, memandang pendapatan sebagai laporan selama proses produksi menunjukkan tingkat likuiditas, kondisi umum keuangan, dan profitabilitas keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada 31 Desember 2015, dalam kasus laba dihitung secara proporsional dengan pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang diberikan. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Sibolga mendapat keuntungan operasional sebesar Rp. 72.788.762.763,07. Pada pendekatan penelitian ini dalam rangka mengukur *likuiditas*, merupakan aktiva yang diubah menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, *kondisi umum keuangan* berupa keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang), serta *profitabilitas*, sebagai kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

3. Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akrua

Likuiditas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga berdasarkan prinsip pendapatan bisa dilihat sebagai komponen pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengakuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek. Likuidasi atas assets merupakan pengakuan atas assets dan *liabilities*. Prinsip realisasi adalah pengungkapan tingkat kepastian laba yang dapat direalisasikan sebagai pengaruh dari peristiwa atau transaksi yang dilaporkan sebagai pendapatan secara eksplisit.

Berikut ini laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada likuiditas laporan kas tahun 31 Desember 2014 dan tahun 31 Desember 2015

Tabel IV.2
Laporan Kas Pemerintah Kota Sibolga Pada
31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Arus Masuk Kas	521.203.125.047,19	609.828.761.819,60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, Tahun 2017

Pengakuan pendapatan selama proses produksi pada Pemerintahan Kota Sibolga pada 31 Desember 2014 berjumlah Rp. 521. 2013. 125.047,19 mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 609.828.761.819,60, dilakukan dalam situasi yang menunjukkan: (1) Pendapatan sewa, bunga dan komisi yang diakui sebagai pendapatan berdasarkan adanya kesepakatan atau kontrak yang peningkatan bertahap dalam klaim terhadap pelanggan; (2) Penerimaan jasa

profesional atau jasa sejenis yang diklaim terhadap pelanggan secara proporsional dengan jasa yang telah diberikan; (3) Pendapatan berdasarkan kontrak jangka panjang diakui berdasarkan tahap perkembangan pekerjaan/konstruksi, atau persentase penyelesaian pekerjaan; (4) Pendapatan berdasarkan *cost plus fixed fee contracts* diakui berdasarkan *accrual basis*; dan (5) Pendapatan yang diakui pada saat terjadi peningkatan nilai *assets* melalui proses *accretion*.

Rasio lancar Pemerintah Kota Sibolga dalam upaya perbandingan antara aktiva lancar dan terhadap utang lancarnya yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akrua, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.3
Aset Lancar dan Utang Lancar Pemerintah Kota Sibolga
31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Des 2014 dan 31 Des 2015
1	Jumlah Aset Lancar	108.542.586.055
2	Kewajiban Jangka Pendek	41.839.729.903

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, Tahun 2017.

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Lancar} &= (\text{Aktiva Lancar}) : (\text{Utang Lancar}) \\
 &= (108.542.586.055) : (41.839.729.903) \\
 &= 2,59
 \end{aligned}$$

Rasio lancar di atas menunjukkan bahwa setiap Rp 1 utang Pemerintah Kota Sibolga dijamin oleh Rp 2,59 aktiva lancar yang dimiliki. Menunjukkan bahwa rasio keuangan yang dimiliki Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan rasio keuangan yang normal. Rasio lancar yang tinggi akan memberikan gambaran tentang kelebihan aktiva lancar, yang akan berpengaruh tidak baik terhadap

profitabilitas. Rasio yang rendah akan berdampak pada risiko likuiditas yang tinggi.

4. Kondisi Umum Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Berdasarkan Laporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akruai

Kondisi umum keuangan menunjuk pada penyajian laporan keuangan secara faktual, akurat, objektif, dan informatif yang cukup untuk melakukan penafsiran tentang transaksi-transaksi bisnis yang berguna untuk memprediksi, membandingkan laporan keuangan yang ada. Menghindari sifat subjektif dalam laporan keuangan harus melalui pengungkapan asumsi-asumsi yang mendasari evaluasi dan prediksi laporan keuangan yang dilakukan.

Kondisi umum keuangan Pemerintah Kota Sibolga yang dilaporkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akruai adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kondisi Umum Keuangan Pemerintah Kota Sibolga
31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2015
1	Jumlah Pendapatan	629.180.161.101,60
2	Jumlah Beban	556.391.398.338,63
	Surplus Dari Operasi	<u>72.788.762.763</u>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, Tahun 2017.

Gambaran umum kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dalam laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh Badan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, mengamali surplus sebesar Rp. 72.788.762.763.

5. Profitabilitas Pemerintah Kota Sibolga Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akrua

Profitabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Berbasis Akrua, sebagai kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang. Laba dari segi semantik menurut Yadiati (2015: 94), menunjuk pada kesejahteraan atau kemakmuran (*wealth*), atau berarti perubahan kemakmuran, perubahan kapital, atau perubahan modal. Laba menurut Irving Fisher (dalam Yadiati, 2015: 94), merupakan “arus jasa atau aliran kemakmuran, sedangkan modal adalah *stock* dari kemakmuran (*stock of wealth*). Apabila aliran modal pada awal periode sama dengan aliran pada modal pada akhir periode, maka dapat dikategorikan makmur. Hingga konsep mempertahankan kemakmuran merupakan konsep mempertahankan modal (*capital*).

Surplus keuangan pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2015 berdasarkan laporan keungan Pemerintah Kota Sibolga pada Laporan Operasional 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga mampu meningkatkan modal (*capital*) yang dimiliki.

Laba sebagai alat prediksi, secara pragmatik angka laba akan memberikan informasi sebagai alat untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk pembagian dividen, dan sebagai alat untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menaksir *earning power* dan nilai perusahaan di masa mendatang. Sebagai pengendali

manajemen laba dijadikan sebagai tolok ukur bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajer atau divisi dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan.

B. Pembahasan

Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan berbasis akrual peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dilakukan kapan saja, selama terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Kelebihan akuntansi berbasis akrual dapat menyajikan laporan akuntansi lebih lengkap dan berfungsi menajerial. Oleh karna itu penelitian telah melakukan wawancara kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tentang bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dari hasil wawancara yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Sibolga. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menghasilkan laporan keuangan likuiditas, gambaran umum kondisi keuangan, serta profabilitas.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang belaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Sehingga itu agar

laporan keuangan yang disajikan berkualitas sangat diperlukan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan acuan wajib dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah. Maka dengan adanya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan akan lebih berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan) di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga termasuk kategori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan respon mengenai PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Standar akuntansi pemerintan diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangn Negara/daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good govemance*). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian dan menjawab rumusan masalah penelitian, disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pengakuan pendapatan berbasis akrual pada laporan produksi Pemerintahan Kota Sibolga pada 31 Desember 2014 berjumlah Rp. 521.2013.125.047,19 mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 609.828.761.819,60, dilakukan dalam situasi yang menunjukkan:
(1) Pendapatan sewa, bunga dan komisi yang diakui sebagai pendapatan berdasarkan adanya kesepakatan atau kontrak yang peningkatan bertahap dalam klaim terhadap pelanggan; (2) Penerimaan jasa profesional atau jasa sejenis yang diklaim terhadap pelanggan secara proporsional dengan jasa yang telah diberikan; (3) Pendapatan berdasarkan kontrak jangka panjang diakui berdasarkan tahap perkembangan pekerjaan/konstruksi, atau persentase penyelesaian pekerjaan; (4) Pendapatan berdasarkan *cost plus fixed fee contracts* diakui berdasarkan *accrual basis*; dan (5) Pendapatan yang diakui pada saat terjadi peningkatan nilai *assets* melalui proses *accretion*.
2. Kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kota Sibolga, mengamali surplus sebesar Rp. 72.788.762.763.

3. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada Laporan Operasional 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga mampu meningkatkan modal (*capital*) yang dimiliki.

B. Saran

Saran-saran penelitian yang disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah yang sudah baik dengan bukti capaian surplus keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga dapat ditingkatkan melalui klasifikasi sistem yang mampu dipahami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran pemerintah Kota Sibolga yang bertugas menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial pemerintah yang bermanfaat.
2. Pemerintah daerah, khususnya melalui tugas Badan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga hendaknya terus mensosialisasikan perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan secara proporsional, transparan dan profesional.
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, secara berkesinambungan mensosialisasikan laporan keuangan secara baik melalui pengendalian anggaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Edisi Revisi. Jakarta Rineka Cipta.
- Atmosoeparto, Kisdarto. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dailibas. Nasution, R. Suwanda, Dadang. 2015. *Bagan Akun Standar: Sistem Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2015. *Pedoman Penulisan Sripsi*. Untuk Kalangan Sendiri. Tidak Dipublikasi.
- Gaspersz, Vincent. 2011. *Total Quality Management*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hanafi, Mamduh M. Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada.
- Julita. 2008. *Budgeting: Pedoman, Pengkoordinasian, dan Pengawasan Kerja*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Sosial*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Manurung, Elvy Maria. 2011. *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Margaretha, Farah. 2011. *Manajemen Keuangan: Untuk Manajer Nonkeuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sangadji, Etta Mamang. Sopiha. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi.
- Stoner, James A.F. Et.al. (2003). *Manajemen*. Jilid II. Jakarta: Indeks Gramedia Grup.
- Triton PB. 2005. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Tugu.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Warren, Carl. S. Et.al. (2015). *Pengantar Akuntansi: Adaptasi Indonesia*. Edisi 25. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadiati, Winwin. 2015. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Internet

<http://rocketmanajemen.com/standar-akuntansi-pemerintahan/> diakses 11/02/2017.

<https://abusyadza.wordpress.com/2007/09/18/standar-akuntansi-pemerintahan/> diakses 11/02/2017.

<http://www.beritasatu.com/makro/118970-empat-masalah-dalam-laporan-keuangan-pemerintah.html>, diakses 11/02/2017.